

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, perhatian utamanya yaitu pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, keduanya dianggap sama pentingnya namun untuk diwujudkan secara bersamaan hampir sulit untuk tercapai, terlebih jika hanya mengutamakan salah satu pilihannya pasti akan menuntut untuk mengorbankan yang lainnya. Pembangunan ekonomi di suatu negara bisa memberikan dampak positif bahkan negatif bagi kondisi ekonomi suatu Negara, dampak yang sering terjadi adalah menimbulkan ketimpangan antar wilayah atau daerah. Ketimpangan antar daerah nampaknya sering terjadi dan menjadi permasalahan yang serius terutama kepada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, antara lain daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, sementara disisi lain ada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang melainkan negara maju sekalipun tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Perbedaannya terletak pada proposi atau besar kecilnya suatu ketimpangan yang terjadi, serta solusi dari tingkat kesulitan yang dialami. Keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dibagi menjadi dua gambaran yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif yang dimaksud adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan

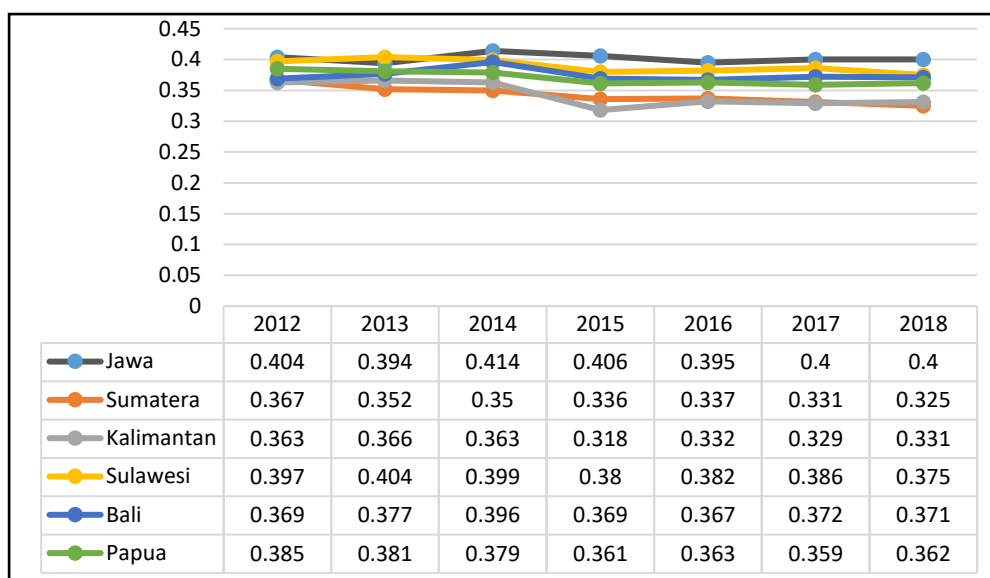
yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi. Sedangkan distribusi pendapatan yang mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu (Sukirno, 2006).

Ukuran yang di pakai untuk mengetahui ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan adalah koefisien gini atau indeks gini yang berkisar antara nol sampai satu. Indeks gini sebesar nol menunjukkan kemertaaan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang hampir sama besarnya. Sedangkan indeks gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna (Hudiyanto, 2017).

Sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan keuangan yang lengkap dengan segala pendukungnya secara alami dapat menarik kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan menjadi magnet tersendiri untuk meningkatkan pembangunan dan sosial (Tambunan, 2018).

Pulau Jawa merupakan wilayah pusat kegiatan di Indonesia, baik bagi pusat kegiatan perekonomian maupun pemerintahan, seharusnya dengan kondisi tersebut bisa menekan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat kepada kondisi ketimpangan yang rendah dibandingkan dengan pulau lainnya seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara, tetapi kondisi ini belum bisa membuat pulau Jawa menekan ketimpangannya

dibandingkan dengan pulau lainnya, hal ini dapat dilihat dari angka ukuran ketimpangan pendapatan. Berikut adalah data perkembangan indeks gini antar pulau di Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2018 (data diolah)

GAMBAR 1.1.

Rata-Rata Nilai Indeks Gini Antar Pulau di Indonesia Tahun 2012-2018

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan perkembangan angka ketimpangan distribusi pendapatan yang digambarkan melalui indeks gini antar pulau di Indonesia dengan rentang waktu 2012-2018. Berdasarkan gambar di atas Pulau Jawa dengan angka indeks gini tertinggi menunjukkan bahwa Pulau Jawa sebagai pulau dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2012 ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi berada di pulau Jawa dengan rata-rata nilai indeks gini sebesar 0.4, kemudian pada tahun 2013 rata-rata indeks gini Pulau Jawa mengalami penurunan menjadi 0.39, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi 0.41, kemudian pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan kembali hingga nilai rata-rata angka indeks gini pulau

jawa berkisar 0.39, hingga sampai 2017 dan 2018 rata-rata nilai indeks gini Pulau Jawa berada pada angka 0.4. Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks gini di Pulau Jawa dengan rentan waktu 2012-2018 mengalami fluktuasi dan berada pada urutan paling atas dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia, yang artinya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa lebih besar daripada pulau yang lainnya.

Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan juga pusat pemerintahan tidak menjadi jaminan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat di pulau tersebut merata antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fenomena diatas, permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang sering dialami beberapa negara terutama negara berkembang seperti Indonesia penting untuk dibahas karena pada dasarnya setiap negara memiliki tujuan mensejahterakan kehidupan bangsanya. Sehingga diharapkan keputusan pemerintah seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menghasilkan pemerataan pendapatan atau dengan kata lain mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, maka faktor-faktor yang terkait harus mendapatkan perhatian lebih. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun dalam Al-Quran yang kandungannya menjelaskan mengenai distribusi pendapatan, agar harta tidak berputar hanya pada orang tertentu saja. Penjelasan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr 59:7).

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait tentang ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya: (Pauzi and Budiana, 2016) melakukan penelitian yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan secara langsung dan tidak langsung di Provinsi Bali, yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Bali, sedangkan (Suanes, 2016) menyatakan bahwa investasi asing di Amerika Latin berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, selain itu (Tri Hartini, 2017) melakukan penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY dengan hasil penelitian bahwa faktor investasi yang didalamnya termasuk PMDN dan PMA penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan yang artinya signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia, serta dalam hasil lainnya bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang artinya signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, (Onafowora and Owoye, 2017) melakukan penelitian yang membahas tentang

dinamika ketimpangan pendapatan di USA dan mendapatkan hasil bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif yang artinya memiliki pengaruh dalam bertambahnya ketimpangan pendapatan di USA. (Rosa dan Sovita, 2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di pulau Jawa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang, maka penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didalam penelitian ini diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018?
3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018?
4. Bagaimana pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
3. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
4. Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi bidang teoritis

Menambah wawasan dan memberikan kontribusi pada bidang ekonomi terutama mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah maupun instansi terkait daerah maupun nasional diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan pada proses pembangunan di setiap daerah, serta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi pembangunan yang tepat.